

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuisisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden, dalam hal ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Surakarta periode 2009-2014 yaitu sejumlah 40 orang. Pengumpulan data dimulai pada tanggal 10 April 2012.

Mengingat kesibukan anggota dewan dan sifat pernyataan dalam kuisisioner yang membutuhkan pemikiran dalam menjawabnya, peneliti berusaha menemui satu per satu responden untuk menjawab pertanyaan dalam kuisisioner, yaitu dari tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 peneliti menunggu pengisian kemudian mengambil jawaban dari responden secara langsung. Masing-masing kelompok responden yang mengembalikan kuisisioner yang telah diisi akan dijadikan sampel penelitian. Dengan metode *sampling* berupa metode *sampling jenuh* sehingga diperoleh data kuisisioner kembali sejumlah 40 kuisisioner, yang terdiri dari 20 anggota Badan Anggaran, dan 20 anggota dewan lainnya.

Dalam sistem pemerintahannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa jabatan 2009-2014, sebanyak 40 anggota terdiri dari: 15 anggota dari PDI-P, 7 anggota dari Demokrat, 4 anggota dari Golkar, 4

anggota dari PAN, 4 anggota dari PKS, 2 anggota dari PDS, 2 anggota dari Gerindra, 2 anggota dari Hanura.

Ditambah berbagai alat kelengkapan di dalamnya, antara lain:

1. Alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta, Komisi:
  - a. Komisi I membidangi Hukum, yang terdiri dari 8 anggota.
  - b. Komisi II membidangi Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri dari 9 anggota.
  - c. Komisi III membidangi Pembangunan, yang terdiri dari 10 anggota.
  - d. Komisi IV membidangi Bidang Sosial, yang terdiri dari 10 anggota.
2. Alat kelengkapan lain yang dimiliki DPRD Kota Surakarta yaitu:
  - a. Badan Kehormatan
  - b. Badan Anggaran
  - c. Badan Legislasi Daerah
  - d. Badan Musyawarah

## **B. Demografi Responden**

Berdasarkan kusioner yang disebar oleh peneliti, diperoleh data yang mengungkap distribusi responden berdasarkan demografi responden. Dari kusioner data tersebut terungkap distribusi responden sebagai berikut:

### **1. Jenis kelamin**

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelamin responden adalah, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
Wanita	10	25%
Pria	30	75%
Jumlah	40	100%

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 40 orang responden, 10 orang (25%) di antaranya adalah responden wanita, sedangkan 30 orang (75%) lainnya adalah responden pria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar didominasi oleh responden pria.

## 2. Pendidikan tertinggi

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi adalah, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Pendidikan Tertinggi**

Pendidikan tertinggi	Jumlah	Prosentase
SLTA / sederajat	13	32,50%
Akademi / D3	3	7,50%
S1	22	55,00%
S2	2	5,00%
S3	0	0,00%
Jumlah	40	100,00%

Berdasarkan data yang disajikan di atas tampak bahwa dari 40 orang responden 13 orang (32.50%) memiliki pendidikan tertinggi SLTA, 3 orang (7.50%) memiliki pendidikan tertinggi Akademi/D3, 22 orang (55.00%)

memiliki pendidikan tertinggi S1, dan 2 orang (5.00%) memiliki pendidikan tertinggi S2. Mengacu pada distribusi pendidikan tertinggi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan tertinggi S1 dan SLTA.

### 3. Usia

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari usia respondennya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Usia**

Tingkat usia	Jumlah	Prosentase
31-40	6	15,00%
41-50	18	45,00%
≥ 51	16	40,00%
Jumlah	40	100,00%

Berdasarkan distribusi usia responden yang disajikan dalam Tabel diatas di atas tampak bahwa, dari 40 orang responden 6 orang (15.00%) di antaranya berusia antara 31-40 tahun; 18 orang (45.00%) di antaranya berusia antara 41-50 tahun, dan 16 orang atau (40.00%) di antaranya berusia lebih dari 51 tahun. Mengacu pada distribusi usia respopnden di atas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara 41-50 tahun dan yang berusia  $\geq 51$  tahun.

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Jumlah responden sebanyak 40.

**Tabel 4.4**  
**Descriptive Statistics**

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation	N
PM	17.00	29.00	23.4750	3.02966	40
TKP	14.00	25.00	20.4000	2.81753	40
AP	36.00	60.00	49.5500	6.80479	40
PDTA	17.00	25.00	21.3250	2.32476	40
PA	27.00	39.00	33.4500	3.05463	40

### 2. Uji Validitas

Pengujian validitas tiap item pertanyaan dilakukan dengan menghitung korelasi *person product moment* antara skor item dan skor total. Hasil uji validitas angket dengan menggunakan program *SPSS 16.00 for Windows* adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Partipasi Masyarakat**

Item	$r_{xy}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,800	0,312	Valid
2	0,553	0,312	Valid
3	0,691	0,312	Valid
4	0,527	0,312	Valid
5	0,849	0,312	Valid
6	0,492	0,312	Valid

Sumber : data diolah

Nilai  $r_{tabel}$  untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang partisipasi masyarakat (1-6) adalah valid, karena nilai  $r_{xy}$  lebih besar dari  $r$  tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket partisipasi masyarakat adalah Valid.

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik**

Item	$r_{xy}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,570	0,312	Valid
2	0,599	0,312	Valid
3	0,586	0,312	Valid
4	0,730	0,312	Valid
5	0,720	0,312	Valid

Sumber : data diolah

Nilai  $r_{tabel}$  untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312 Tabel 4.6 menunjukkan semua butir pernyataan tentang transparansi kebijakan publik adalah valid, karena nilai  $r_{xy}$  lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket transparansi kebijakan publik adalah valid.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik**

Item	$r_{xy}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,331	0,312	Valid
2	0,381	0,312	Valid
3	0,343	0,312	Valid
4	0,749	0,312	Valid
5	0,797	0,312	Valid
6	0,870	0,312	Valid
7	0,653	0,312	Valid
8	0,386	0,312	Valid
9	0,416	0,312	Valid
10	0,660	0,312	Valid
11	0,730	0,312	Valid
12	0,656	0,312	Valid

Sumber : data diolah

Nilai  $r_{tabel}$  untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312 Tabel 4.7 menunjukkan butir pernyataan tentang Akuntabilitas publik adalah valid, karena nilai  $r_{xy}$  lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket akuntabilitas publik adalah valid.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran**

Item	$r_{xy}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,734	0,312	Valid
2	0,620	0,312	Valid
3	0,620	0,312	Valid
4	0,731	0,312	Valid
5	0,569	0,312	Valid

Sumber : data diolah

Nilai  $r_{\text{tabel}}$  untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312 Tabel 4.8 menunjukkan semua butir pernyataan tentang pengetahuan dewan adalah valid, karena nilai  $r_{xy}$  lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket pengetahuan dewan tentang anggaran adalah valid.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penyusunan APBD**

Item	$r_{xy}$	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan
1	0,757	0,312	Valid
2	0,449	0,312	Valid
3	0,543	0,312	Valid
4	0,768	0,312	Valid
5	0,421	0,312	Valid
6	0,552	0,312	Valid
7	0,314	0,312	Valid
8	0,344	0,312	Valid

Sumber : data diolah

Nilai  $r_{\text{tabel}}$  untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312 Tabel 4.9 menunjukkan semua butir pernyataan tentang Penyusunan APBD adalah valid, karena nilai  $r_{xy}$  lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Dengan demikian semua butir pernyataan angket Penyusunan APBD adalah valid.

### 3. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dengan cara menghitung *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel adalah :



**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Partipasi Masyarakat	0,731	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik	0,634	Reliabel
Akuntabilitas Publik	0,836	Reliabel
PDTA	0,665	Reliabel
Penyusunan APBD	0,714	Reliabel

Sumber : data diolah

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan *Cronbach's Alpha* sebagaimana terlihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai Alpha lebih dari 0,6. Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009) dari uji normalitas penelitian dengan analisis statistik *one-Sampel Kolmogorov-Smirnov test* dengan tingkat signifikansi 0,05 , jika signifikansi  $\leq 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

Sedangkan dalam penelitian ini hasil uji K-S menunjukkan bahwa besarnya nilai K-S adalah 0,942 dan signifikansi pada 0,337, maka hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>Variabel</b>	<b>Kolmogorov - Smirrov</b>	<b><i>p-value</i></b>	<b>Keterangan</b>
<i>Unstandardized Residual</i>	0,942	0,337	Sebaran data normal

Sumber : data diolah

**b. Uji Multikolinearitas.**

Dalam penelitian ini untuk menguji adanya multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai tolerance. Menurut Ghozali (2011: 106), bahwa multikolinearitas terjadi apabila nilai  $VIF \geq 10$  atau *tolerance value*  $\leq 0,10$ . Hasil perhitungan VIF untuk masing-masing variabel bebas disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Tolerance</i></b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Partisipasi Masyarakat	0,959	1,043	Bebas multikolineritas
Transparansi Kebijakan Publik	0,866	1,154	Bebas multikolineritas
Akuntabilitas Publik	0,993	1,007	Bebas multikolineritas
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0,896	1,115	Bebas multikolineritas

Berdasarkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil nilai *tolerance* mendekati 1 atau diatas 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Mengacu pada pendapat Ghozali (2005), jika hasil perhitungan nilai signifikansi dari Glejser test  $> 5\%$  maka dikatakan tidak ada masalah heterokedasitas. Perhitungan nilai signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	p-value	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,985	Bebas Heteroskedastisitas
Transparasi Kebijakan Publik	0,967	Bebas Heteroskedastisitas
Akuntabilitas Publik	0,399	Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan Dewan Tentang anggaran	0,818	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.13 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 5. Hasil analisis regresi linear berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, transparasi kebijakan publik, akuntabilitas dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penyusunan anggaran. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 16 didapatkan persamaan regresi:

$$Y = 2,432 + 0,440X_1 + 0,309X_2 + 0,126X_3 + 0,382X_4$$

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- a. Konstanta sebesar 2,432 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran maka seharusnya memiliki kemampuan dalam penyusunan APBD.
- b. Koefisien regresi  $X_1$  yaitu partisipasi masyarakat menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,440 dengan demikian dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat justru meningkatkan penyusunan APBD
- c. Koefisien regresi  $X_2$  yaitu transparansi kebijakan publik menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,309 dengan demikian dapat diketahui bahwa transparansi kebijakan publik mampu meningkatkan penyusunan APBD.
- d. Koefisien regresi  $X_3$  yaitu akuntabilitas publik menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,126 dengan demikian dapat diketahui bahwa akuntabilitas publik justru meningkatkan penyusunan APBD.
- e. Koefisien regresi  $X_4$  yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,382 dengan demikian dapat diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran justru meningkatkan penyusunan APBD.

## 6. Hasil Pengujian Hipotesis

### a. Uji t (uji secara individu)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel tidak bebas (*dependent*) secara terpisah atau sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil uji t**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.432	4.931		.493	.625
PM	.440	.117	.436	3.756	.001
TKP	.309	.133	.285	2.333	.026
AP	.126	.051	.280	2.454	.019
PDTA	.382	.158	.291	2.421	.021

Sumber: data diolah

Dari hasil tabel 4.14. tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penyusunan APBD.

Variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai  $t_{hitung}$  (3,756) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_1$  diterima artinya secara partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

Variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai  $t_{hitung}$  (2,333) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,026 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_2$  diterima artinya secara transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

Variabel akuntabilitas publik diketahui nilai  $t_{hitung}$  (2,454) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,019 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_3$  diterima artinya secara akuntabilitas publik mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diketahui nilai  $t_{hitung}$  (2,421) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,021 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_4$  diterima artinya secara pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

### b. Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. Hasil uji F didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	199.056	4	49.764	10.566	.000
Residual	164.844	35	4.710		
Total	363.900	39			

Sumber: data diolah

Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu 10,566 > 2,84 dan nilai signifikansi = 0,000 <  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyusunan APBD.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil perhitungan untuk nilai  $R^2$  diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- $R^2$  sebesar 0,495. Hal ini berarti bahwa 49,5% variasi variabel penyusunan APBD dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan

pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan sisanya yaitu 50.5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

**Tabel 4.16**  
**Uji R Square**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740	.547	.495	2.17022

## 7. Pembahasan

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap  $H_1$  menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat diterima karena variabel partisipasi masyarakat diketahui nilai  $t_{hitung}$  (3,756) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_1$  diterima artinya secara partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

Hasil tersebut telah mendukung penelitian yang dilakukan Sopanah (2004) terkait studi fenomenologis partisipasi masyarakat, menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kota Malang berpengaruh secara signifikan pada penyusunan APBD. Hal ini konsisten dalam temuan hasil penelitian skripsi ini yang menyebutkan bahwa dalam perspektif dewan di Kota Surakarta ternyata partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan dalam penyusunan APBD.



Persepsi anggota dewan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang harus dicapai. Hal ini secara teori konsisten dalam penelitian Coryanata (2007), dan Werimon (2007) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat searah positif dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan ekonomis APBD. Penelitian dalam persepsi sangatlah mungkin terjadi perbedaan.

Dalam tataran teori normatif berdasar penelitian sebelumnya (Coryanata (2007), Werimon(2007), Rahayu(2007)) partisipasi masyarakat di Kota Surakarta ini apabila didorong secara penuh dapat membantu dewan mengenal kebutuhan konstituen dalam wilayahnya. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan menyebabkan APBD terbentuk berdasarkan analisa kebutuhan yang tepat, searah dengan itu efisiensi, efektifitas serta ekonomis dapat dengan mudah untuk tercapai. Dengan demikian, apabila peran serta masyarakat sudah tercapai, maka hal tersebut seharusnya dapat memangkas perilaku oportunistik, koruptif dan *negatif political will* yang dewasa ini menjadi *habitus* Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan kemampuan pengetahuannya.

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap  $H_2$  menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat diterima karena variabel transparansi kebijakan publik diketahui nilai  $t_{hitung}$  (2,333) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau

dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,026 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_2$  diterima artinya secara transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

Persepsi anggota dewan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemerintah Surakarta sangat memahami serta menganggap penting adanya transparansi kebijakan publik didalam penyusunan rancangan APBD dan berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan baik, antara lain dengan cara memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surakarta. Sebagai bukti adalah dapat diaksesnya dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran oleh masyarakat luas. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta ataupun melalui Bagian Humas Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta pun telah memiliki situs/*web site* sebagai salah satu cara untuk sosialisasi kegiatan maupun program kerja pemerintah Kota Surakarta.

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian Sopanah dan Isa Wahyudi (2010), yang dikarenakan transparansi kebijakan publik di wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu masih dalam taraf retorika dan implementasinya masih dalam formalitas. Akses terhadap kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam

situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan.

Yulinda dan Lilik (2010) dalam penelitiannya menyatakan, kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap  $H_3$  akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat diterima, karena variabel akuntabilitas publik diketahui nilai  $t_{hitung}$  (2,454) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,019 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_3$  diterima artinya secara akuntabilitas publik mempunyai pengaruh secara signifikansi terhadap penyusunan APBD.

Hasil pengujian tingkat signifikan uji t terhadap  $H_4$  Pengetahuan Dewan tentang keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD dapat diterima, karena Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diketahui nilai  $t_{hitung}$  (2,421) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $0,001 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_4$  diterima artinya secara pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD.

Dalam tataran teori normatif berdasar penelitian sebelumnya (Jaka Winarna (2007)) menyebutkan bahwa pengetahuan dewan yang memadai akan menciptakan APBD yang berhasil guna dan berdaya guna. Tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, pengetahuan dewan tentang anggaran pun begitu prioritas dibutuhkan dalam proses penyusunan APBD. Dewan memiliki legitimasi untuk menentukan arah pembangunan masyarakat ke depan, melalui konsep anggaran yang jelas serta kemampuan mengaplikasikan anggaran dalam konteks masyarakatlah APBD dapat bermanfaat secara optimal.